



**KEPUTUSAN CAMAT
BANGKO
NOMOR 77 TAHUN 2017**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KEC. BANGKO
TAHUN 2014 - 2018**

**KECAMATAN BANGKO
2017**



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

KECAMATAN BANGKO

Jalan Bangko – Kerinci Km. 4, Waskita Karya, Bangko, Kode Pos 37312
Telpon : 0746 – Fax : Email :kecamatanbangko@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BANGKO KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018

CAMAT BANGKO KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang :a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Perangkat Kerja Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin, perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarkodan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rencana Anggaran, Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2014 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690,);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

- Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
 27. Peraturan Bupati Merangin Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018
 28. Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 tahun 2016 Tentang Perubahan capaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 dalam peraturan daerah kabupaten merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana pembangunan Jangka menengah daerah kabupaten merangin tahun 2014 - 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BANGKO KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHANRENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat kecamatan, Lurah, Kasi dan Kasubbag di Lingkungan Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal : Agustus 2017

CAMAT,

ANDRIE FRANSUSMAN, S.STP

PEMBINA (IV/A)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin, di Bangko;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, di Bangko;
3. Yth. Sdr. Inspektur Kab. Merangin, di Bangko;
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah SWT sehingga penyelesaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin 2014-2018 dapat terlaksana. Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis. Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran dan kinerja pembangunan daerah.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra OPD Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Bangko sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Renstra Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 disusungguhnya menyediakan suatu tolak ukur dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran Target Indikator Kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya RENSTRA Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin 2014-2018 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin selama masa lima tahun kedepan.

Demikian Renstra Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin 2014-2018 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal : Agustus 2017

CAMAT,

ANDRIE FRANSUSMAN, S.STP

PEMBINA (IV/A)

NIP. 19790226 199711 1 001

DAFTAR ISI

SURAT	i
KEPUTUSAN		
KATA	ii
PENGANTAR		
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN	8
	2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangko	13
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangko	18
	2.4 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2008-2013.....	20
	2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	21
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	25
	3.1 Identifikasi Permasalahan.....	26
	3.2 Telaah Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pelalawan.....	26
	3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS.....	30
	3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	31
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SASARAN DAN KEBIJAKAN	33
	4.1 Visi dan Misi Kecamatan Bangko	33

4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bangko.....	34
4.3	Penetapan Strategi dan Kebijakan.....	46
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	50
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2014-2018.....	71
BAB VII	PENUTUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Tahun 2013(Menurut Jabatan dan Eselonering).....	13
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Kecamatan Bangko Tahun 2013 (Menurut Pendidikan, Pangkat Dan Golongan).....	14
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Kecamatan Bangko Tahun 2013 Menurut Jabatan dan Tingkat Penjenjangan.....	15
Tabel 2.4	Diklat Struktural Yang Telah diikuti Pegawai Kecamatan Bangko.....	16
Tabel 2.5	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Kecamatan Bangko Tahun 2008-2013.....	17
Tabel 2.6	Perkembangan Anggaran Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Tahun 2008-2013.....	20
Tabel 2.7	Realisasi dan Peningkatan Anggaran Kecamatan Bangko.....	21
Tabel 3.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi Dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas.....	29
Tabel 3.2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar....	29
Tabel 3.3	Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan dan Kesehatan.....	29
Tabel 3.4	Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UKM.....	30
Tabel 3.5	Meningkatkan Prestasi Generasi Muda dan Kesetaraan Gender	30
Tabel 4.1	Tujuan Yang Ditetapkan Untuk Mencapai Visi dan Misi....	34
Tabel 4.2	Sasaran Yang Ditempuh Untuk Mencapai Tujuan.....	35
Tabel 4.3	Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal.....	38
Tabel 4.4	Matrik Urgensi Faktor Internal.....	39
Tabel 4.5	Matrik Urgensi Faktor Eksternal.....	40
Tabel 4.6	Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan.....	41
Tabel 4.7	Formulasi Strategi SWOT.....	43
Tabel 4.8	Strategi Yang ditetapkan Dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Melalui Kebijakan dan Program.....	46
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bangko.....	51
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Kecamatan. Bangko yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014-2018 Kabupaten Merangin	71

Tabel6.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangko..... 73

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEC. BANGKO KAB. MERANGIN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai amanat pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada pasal 89 ayat (1) Permendagri ini menyebutkan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD, dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;
- b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
- d. penetapan Renstra SKPD.

Dilatarbelakangi oleh amanat dari regulasi tersebut, maka SKPD Kecamatan Bangko menyusun Rencana Strategis Kecamatan Bangko Tahun 2014-2018. Renstra ini dibuat dan ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 tahun 2014.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEC. BANGKO KAB. MERANGIN

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Bangko tahun 2014-2018 memberikan gambaran-gambaran terhadap, visi, misi, tujuan, strategi, Kecamatan Bangko merupakan salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Pemerintahan Dan Trantibum, Bidang Sosial, Bidang Pelayanan Umum, dan Bidang Pemerdayaan Masyarakat Desa. berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Bangko merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan Kekuatan (**strenghts**), Kelemahan (**weakness**), Peluang (**opportunities**), dan Ancaman (**threats**) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis (Renstra) disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Rencana Strategis Kecamatan Bangko Tahun 2014-2018 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat Bangko Nomor 77

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEC. BANGKO KAB. MERANGIN

Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bangko Tahun 2014-2018. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Selain itu Pemerintah Kabupaten Merangin juga melakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Kecamatan Bangko Tahun 2014-2018. Perubahan Renstra Kecamatan Bangko Tahun 2014-2018 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bangko merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin 2014-2018 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEC. BANGKO KAB. MERANGIN

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Bangko 2014-2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEC. BANGKO KAB. MERANGIN

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin tahun 2014 nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin tahun 2014-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEC. BANGKO KAB. MERANGIN

14. Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018.
15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Bangko dimaksud untuk menyediakan tolak ukur dan bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Bangko untuk secara Konsekuen dan Konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEC. BANGKO KAB. MERANGIN

b. Tujuan

Penyusunan Renstra Kantor Camat Bangko bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan dan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Bangko dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Tahun 2014–2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN UMUM, Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi serta data penduduk Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dengan maksud mengetahui keadaan Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin lima tahun kedepan.
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, Bab ini menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangko serta TUPOKSI Sekretariat dan masing-masing bidang serta rumusan tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaku aktivitas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN, Bab ini menguraikan rumusan visi dan misi serta kebijakan strategis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF, Bab

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEC. BANGKO KAB. MERANGIN

ini berisikan rencana program kegiatan Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin pelalawan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Merangin.

**BAB VI : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANGKO MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Regulasi Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dimana pada peraturan tersebut menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi;

- a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

A. Kedudukan Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

1. Kecamatan Bangko adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pemerintahan Dan Trantibum, Bidang Sosial, Bidang Pelayanan Umum, dan Bidang Pemerdayaan Masyarakat Desa.
2. Kecamatan Bangko dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati.

C. Fungsi Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tersebut Kecamatan Bangko mempunyai fungsi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila.
2. Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 5. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragam, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
 6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Koordinasi Pelaksanaan tugas Antarinstansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk Menyelesaikan Permasalahan yang Timbul dengan memperhatikan Prinsip demokrasi, hakasasi Manusia, pemerataan, Keadilan, Keistimewaan, dan kekhususan, potensi serta Keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Pengembangan Kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila, dan
 9. Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal.
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Susunan Organisasi Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan

Terdiri dari 4 (Empat) Kepala Seksi, yaitu :

- a. Kasi pemerintahan dan Trantibum
- b. Kasi PPMDK
- c. Kasi Sosial
- d. kasi Pelayan Umum

Terdiri dari 2 (dua) Kepala Subbagian, yaitu :

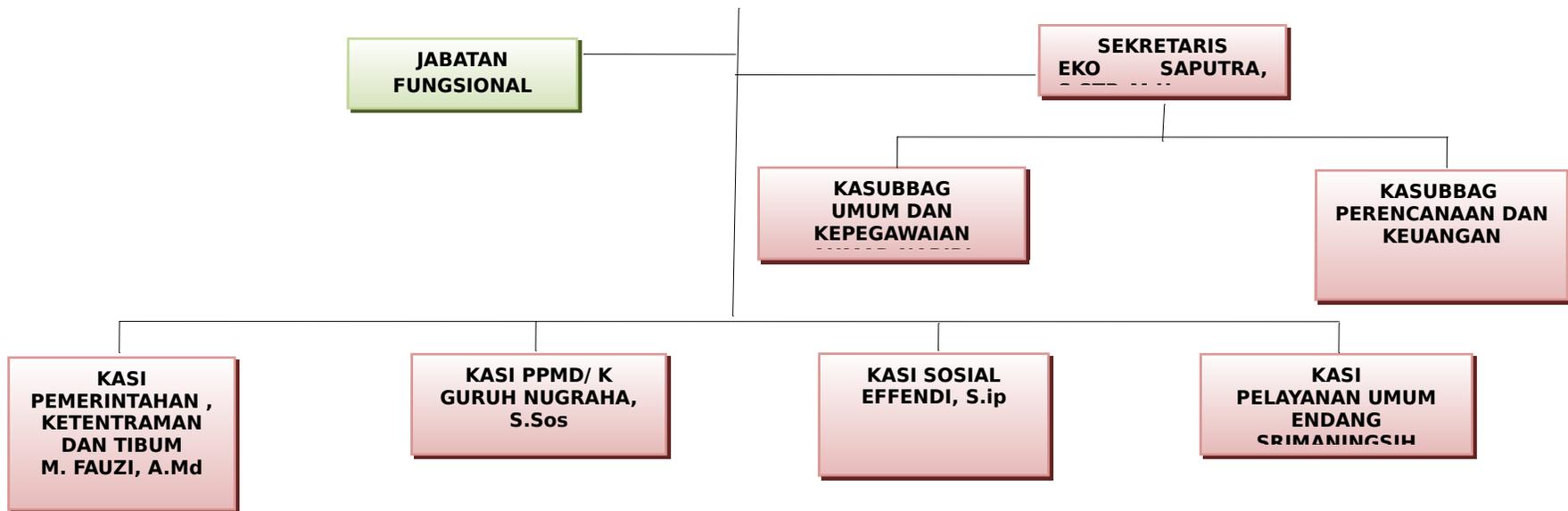
- a. Kasubbag Program dan Keuangan
- b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

3. Jabatan Fungsional
4. Staf Pelaksana terdiri dari :
 1. Staf Pegawai Negeri Sipil 18 (delapan belas) orang
 2. Staf Honorer 20 (duapuluh) orang

Untuk uraian lebih rinci struktur organisasi Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan

BAGAN 1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016



2.2. Sumber Daya Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bangko didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Sebagai institusi perencana pembangunan di daerah, untuk dapat menghasilkan perencanaan yang baik dan berkualitas, dibutuhkan bermacam aparatur dengan disiplin ilmu yang berbeda. Demikian pula halnya dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Aparatur yang ada berasal dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Keadaan pegawai pada Desember 2016 di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin berjumlah 18 (delapan belas) orang Pegawai Negeri Sipil, 20 (dua puluh) orang pegawai honorer. Gambaran keadaan pegawai dan perkembangannya selama Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.1
JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN BANGKO
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016
(MENURUT JABATAN DAN ESELONERING)

NO	UNIT KERJA	PNS (Eselon/Orang)					JML	NON PNS
		II	IIIA	IIIB	IV	STAF		
1	Camat	-	1	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	-		1	2	11	14	7
3	Kasi Pem & Trantibum	-	-	-	1	4	5	4
4	Kasi PPMD/ K	-	-	-	1	4	5	3
5	Kasi Sosial	-	-	-	1	5	6	4
6	Kasi Pelayanan umum	-	-	-	1	7	8	6
Jumlah		-	1	1	6	21	40	19

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bangko Kab. Merangin Tahun

Sedangkan jumlah pegawai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin menurut klasifikasi pendidikan, pangkat dan golongannya dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.2.
JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN BANGKO TAHUN 2016
(MENURUT PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN)

No	Pendidikan	Pangkat / Golongan (Orang)										JLH	
		II				III				IV			
		a	b	c	D	a	b	c	d	a	b		
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	4
4	SARJANA MUDA (D3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	STRATA 1 (S1)	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	5
6	STRATA 2 (S2)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
7	STRATA 3 (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J u m l a h	-	-	-	-	3	-	6	-	1	1	-	11

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bangko Kab. Merangin Tahun

2016

Untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural yang ada di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, maka kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan maupun penjurangan dapat diangkat pada jabatan struktural. Persyaratan penjurangan diperoleh aparatur melalui Pendidikan dan Latihan Pimpinan (Diklatpim). Jumlah pegawai Kecamatan Bangko yang telah

mengikuti Diklat Pim sampai Tahun 2016 menurut jabatan dan tingkat penjenjangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.
JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN BANGKO TAHUN 2016
MENURUT JABATAN DAN TINGKAT PENJENJANGAN

No	Jabatan	Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan			Keterangan
		PIM II	PIM III	PIM IV	
1	Camat	-	1	-	1 orang
2	Sekretaris	-	-	1	1 orang
3	Kasubag/ Kasi	-	-	1	1 orang
J u m l a h			1	2	3 orang

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bangko Kab. Merangin Tahun 2016

Upaya pengembangan sumber daya manusia di Kecamatan Bangko Kab. Merangin terus dilakukan setiap tahunnya melalui pendidikan dan latihan. Selain diklat struktural, Kecamatan Bangko juga mengirimkan aparaturnya untuk mengikuti diklat-diklat fungsional. Untuk lebih jelasnya tabel berikut memperlihatkan data aparatur Kecamatan Bangko dan diklat-diklat yang pernah diikutinya.

Tabel 2.4.
DIKLAT STRUKTURAL YANG TELAH DIKUTI PEGAWAI KECAMATAN BANGKO

No	Nama	Jenis Diklat Struktural	Tgl Pelatihan	Tempat	Pelaksana
1	FAUZIAH, SE	Diklat PIM TK III	2009	JAMBI	
2	EKO SAPUTRA, S.STP, MH	Diklat PIM IV	01-10-2013		
3	M.FAUZI, A.Md	Diklat PIM IV	01-10-2013		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Sumber
:
Subbag
Umum
dan

Kepegawaian Kecamatan Bangko Kab. Merangin Tahun 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Tabel 2.5 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi

Kecamatan Bangko Tahun 2008-2013

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase Capaian
				Realisasi
1	2	3	4	5
1	Jumlah dokumen, surat yang terselesaikan	6000	6000	100%
2	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100 %
3	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terlunasi pajaknya	11	11	100 %
4	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	12	100 %
5	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	12	100 %
6	tersedianya tenaga administrasi dan teknisi perkantoran	20	20	100 %
7	tersedianya alat tulis kantor	12	12	100 %
8	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	12	12	100 %
9	jumlah bahan bacaan peraturan perundang undangan yang diadakan	3	3	100 %
10	Tersedianya makanan dan minuman	12	12	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase Capaian Realisasi
1	2	3	4	5
11	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi yang di laksanakan	10	10	100 %
12	Terselenggaranya koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	12	12	100 %
13	Tersedianya jasa perbaikan Peralatan Kantor	12	12	100 %
14	Terselenggaranya Pembinaan Nilai-nilai Keagamaan	1 Kali	1 Kali	100 %
15	Jumlah Penduduk yang memperoleh e-KTP	25000	77000	100 %
16	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diadakan	3	3	100 %
17	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	8	8	100 %
18	Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	38	38	100 %
19	Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Tekhnis Fungsional	5	5	100 %
20	Terlaksananya program monitoring dan	3	3	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase Capaian Realisasi
1	2	3	4	5
	Evaluasi PBB dan BPHTB			
21	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	5	5	100 %
22	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	15	15	100 %
23	Jumlah Laporan keuangan yang disusun	9	9	100 %
24	Terlaksananya penyelenggaraan Administrasi desa	3	3	100 %
25	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan	14 Kelompok	14 Kelompok	100 %
26	Terlaksananya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	12	12	100 %
27	Terlaksananya pemantauan program percepatan Perlindungan Sosial	1 Kali	1 Kali	100 %
28	Terlaksananya kegiatan monitoring dan petertiban SITU	4 Kali	4 Kali	100 %

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Kabupaten Merangin didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam lima tahun, dari tahun 2008-2013, didapatkan capaian kinerja pelayanan yang ditampilkan dalam tabel di halaman berikut ini

2.4 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2008-2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, Kecamatan Bangko mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan Kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penanaman Modal, Penelitian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Maka telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta tujuan organisasi Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

Tabel 2.6
Perkembangan Anggaran Kecamatan Bangko
Kabupaten Merangin
Tahun 2008-2014

NO	TAHUN	ALOKASI ANGGARAN		JUMLAH (Rp)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	2008	1.851.801.000,-	-	-
2.	2009	-	-	-
3.	2010	2.321.471.000,-	583.000.000,-	2.904.471.000,-
4.	2011	2.692.239.000,-	343.450.000,-	3.035.689.000,-
5.	2012	2.936.372.000,-	1.131.098.148,-	4.067.470.148,-

6.	2013	3.155.014.603,-	1.468.428.682,-	4.623.443.285,-
7.	2014	3.601.552.000,-	1.672.535.682,-	5.274.087.682,-

Sedangkan persentase realisasi anggaran dan peningkatan anggaran per tahun dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.7
Realisasi dan Peningkatan Anggaran Kecamatan Bangko
Tahun 2008-2016

N O	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	PENINGKATAN
		(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	ANGGARAN
				(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	2008	-	-	-	-
2.	2009	-	-	-	-
3.	2010	2.904.471.000	2.897.053.487	99,74	
4.	2011	3.035.689.000	3.085.338.757	101,64	4,52
5.	2012	4.067.470.148	3.911.013.945	96,15	33,99
6.	2013	4.623.443.285	4.528.283.574	97,94	13,67
7.	2014	5.274.087.682	4.840.577.959	91,78	14,07
8.	2015	2.594.991.000	2.413.605.610	93,01	50,80
9.	2016	1.765.860.192	1.679.245.576	95,10	31,95

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bangko

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD, selaku Pelaksana pelayanan mempunyai peluang sekaligus kendala dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Belum berjalannya mekanisme proses perencanaan pembangunan dari tingkat Desa sampai Kabupaten sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan partisipasi masyarakat menurun untuk melaksanakan dan mengikuti proses perencanaan sehingga semakin ketatnya pengawasan pembangunan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, peluang untuk dapat mendorong proses perencanaan pembangunan yang lebih baik.
2. Belum efektifnya kader pemberdayaan desa yang ada dikarenakan belum adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten sehingga Kecamatan untuk melaksanakan fasilitasi terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian stimulasi pembangunan desa.
3. Menurunnya partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sehingga perlu melakukan Koordinasi dan komunikasi Kecamatan dengan unsur Tripika yang sangat baik
4. Harga komoditas karet dan sawit yang tidak stabil sehingga mengakibatkan menurunnya kondisi ekonomi rumah tangga, diminta kepada masyarakat untuk dapat memampatkan pekarangan rumah dengan GEMA WATANABE.
5. Jauhnya jangkauan pengawasan terhadap keberadaan Polsek dan Koramil
Sehingga perlu pembentukan Satu Regu Satpol PP di Kecamatan yang secara ex officio Kasi Trantib Kecamatan sebagai Kasatpol PP Kecamatan.

6. Tidak adanya unit kerja OPD teknis yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
Telah diterbitkannya Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang salah satu kewenangan yang dilimpahkan adalah mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
7. Masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adanya peluang Desa untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa.
8. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelayanan yang dapat diberikan oleh OPD Kecamatan sehingga perlu koordinasi pihak Kecamatan dengan pihak Desa.
9. Dengan makin beratnya tantangan dalam pelaksanaan tugas OPD kini dan masa yang akan datang. Sehingga diperlukan alokasi dana untuk meningkatkan Analisis Pelayanan di Kecamatan Bangko.

Adapun hambatan-hambatan yang ada pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014 ini antara lain :

1. Kurangnya personil Aparatur Kecamatan khususnya personil staf pelaksana PNS sehingga kegiatan pelayanan di Kecamatan Bangko belum optimal.

2. Minimnya kesempatan personil Aparatur Kecamatan untuk mengikuti bintek, diklat/pelatihan sehingga pelaksanaan Tugas dan Fungsi masing-masing Seksi belum berjalan dengan baik.
3. Masih Minimnya sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur Kecamatan yang tersedia pelaksanaan kegiatan belum terlaksana dengan baik.
4. Dalam penatausahaan keuangan belum menggunakan system informasi keuangan, sehingga memperlambat penyelesaian laporan akuntansi keuangan.yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana.
5. Masih minimnya pemahaman pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat memperlambat penyelesaian SPJ.
6. Belum berjalannya mekanisme proses perencanaan pembangunan dari tingkat Desa sampai Kabupaten sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan partisipasi masyarakat menurun untuk melaksanakan dan mengikuti proses perencanaan.
7. Belum efektifnya kader pemberdayaan desa yang ada dikarenakan belum adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten.
8. Menurunnya partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan

9. Harga komoditas karet dan sawit yang tidak stabil sehingga mengakibatkan menurunnya kondisi ekonomi rumah tangga
10. Masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Untuk melihat sejauh mana tingkat persiapan dan perkembangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemimpin Kegiatan, telah dilakukan evaluasi baik dalam bentuk rapat staf secara berkala maupun pertanggungjawaban laporan per triwulan. Melalui upaya ini, secara umum tidaklah ditemukan hambatan dan permasalahan yang sangat prinsipil dalam rangka penyelesaian kegiatan dimaksud.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra- SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan pembangunan Daerah merupakan pemikiran kesenjangan antara kinerja pembanguan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi rill saat perencanaan dibuat. Potensi pemasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didaya gunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses peyusunan rencana pembangunan tingkat kecamatan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang dapat dilakukan sebelumnya. Idenfikasi isu yang tepat dapat bersifat strategis dan meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan tingkat Kecamatan.

Dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan masyarakat yang saat ini dihadapi diharapkan kualitas pelayanan Kecamatan menjadi lebih baik sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pelayanan SKPD Kantor Camat Bangko dilakukan analisa dari kondisi internal yang dilihat dari aspek sumber daya manusia yang tersedia dan kondisi pengelolaan keuangan SKPD dan analisa kondisi iksternal yang dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan yang muncul dari

analisa kondisi internal dan eksternal dapat dilihat pada matrik analisa.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye Pemilukada, kemudian kondisi umum dan masalah pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Merangin saat ini, maka visi RPJMD 2014-2018 Kabupaten Merangin adalah:

Visi Daerah Kabupaten Merangin adalah “ **BERBENAH** menuju **MERANGIN EMAS**”.

BANGUN EKONOMI RAKYAT: Mengartikan bahwa hal yang utama dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi secara efisien dan efektif.

BERSIH: Mengartikan bahwa suatu kondisi dimana aparatur pemerintah daerah memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel

AMANAH: Mengartikan bahwa aparatur negara menjalankann tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan disiplin.

Misi Daerah Kabupaten Merangin dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi Kepada Dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektif Dan Akuntabilitas.
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar.
3. Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Dan Kesehatan.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UMKM.
5. Meningkatkan Prestasi Generasi Muda Dan Kesetaraan Gender.

6. Meningkatkan pengelolaan dan Perlindungan Hutan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui rekrutmen yang baik dan peningkatan kesejahteraan
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas
4. Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi
6. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas
7. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing investasi, ketengakerjaan dan kinerja BUMD
8. Meningkatkan pendayagunaan, potensi agrowisata dan pengelolaan sumberdaya pertanian untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan daerah
9. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan

10. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlet berprestasi
11. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah
12. Meningkatkan penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindungan, cagar budaya tradisional melayu sebagai pusat penelitian dan, wisata alam dan budaya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ditetapkan criteria dan indikator-indicator komposit sebagai indikasi perwujudan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Penjabaran criteria dan indicator- indicator keberhasilan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI BAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS			
No	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BIROKRASI DENGAN MENGEDEPANKAN TRANSPARANSI, EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS.	1. Meningkatkan Kualitas pelayanan publik yang transparan , akuntabel , Partisipatif dan berkualitas.	1 Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusuan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah
			2. Peningkatan Akuntabilitas kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas Pemrintahan dan Pembangunan .
			3. Peningkatan Kualitas Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah
			4. Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh perangkat Daerah.
			5. Penataan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Anggaran yang Transparan berbasis Sitem organisasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik
		2. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompotensi	1. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji)..

Tabel 3.2

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS				
No	MISI		TUJUAN	SASARAN
2	MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	1.	Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas	1 Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu.

Tabel 3.3

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS				
No	MISI		TUJUAN	SASARAN
3	MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	1.	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	1 Peningkatan pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak

Tabel 3.4

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS				
No	MISI		TUJUAN	SASARAN
4	MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN UKM	1.	Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah
		2.	Meningkatkan pendayagunaan, potensi agrowisata dan pengelolaan sumber daya pertanian untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan daerah	1. Peningkatan produksi pertanian untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani 2. Pengembangan potensi Agrowisata agar terwujudnya kabupaten merangin sebagai daerah wisata

Tabel 3.5

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS				
No	MISI		TUJUAN	SASARAN
5	MISI V: MENINGKATKAN PRESTASI GENERASI MUDA DAN KESETARAAN GENDER	1.	Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	1. Peningkatan pemuda berprestasi

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pengembangan wilayah dalam RT/RW Kabupaten Merangin menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah, dalam mempercepat pengembangan wilayah, mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional, Provinsi Jambi dan kebutuhan daerah Kabupaten. Dengan mempertimbangkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah pemukiman akan berimplikasi pada terjadinya alih fungsi tata ruang. Selain itu permasalahan lain yang terjadi adalah perselisihan batas wilayah, baik itu di wilayah desa, kecamatan maupun kabupaten, pelanggaran pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi dan

cagar alam Hal ini akan menjadi perhatian utama dalam menyusun Renstra Kecamatan Bangko 2014-2018.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Selain Isu dan permasalahan sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Bangko sebagai sebuah OPD seperti yang tercantum dalam identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD, Isu dan permasalahan Daerah juga menjadi bahan perhatian yang tak terlepas dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bangko.

Dalam mewujudkan tujuan Pelayanan Masyarakat, sebagaimana dipaparkan didalam tabel diatas, maka Kabupaten Merangin menetapkan sasaran pokok Pelayanan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusuan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah
2. Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusuan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah.
3. Peningkatan Kualitas Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah
4. Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh perangkat Daerah.
5. Penataan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Anggaran yang Transparan berbasis Sitem organisasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik
6. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).
7. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu.
8. Peningkatan pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak.

9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah
10. Peningkatan produksi pertanian untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani
11. Pengembangan potensi Agrowisata agar terwujudnya kabupaten merangin sebagai daerah wisata
12. Peningkatan pemuda berprestasi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Tujuan pembangunan Kabupaten Merangin telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Merangin, maka Pemerintah Kecamatan Bangko mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin dengan mengemban visi dan misi sebagai berikut :

1.1 Visi

Dalam mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap satuan kerja, Kecamatan bangko mempunyai VISI yaitu: ***“Terwujudnya Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka BERBENAH Menuju Merangin Emas 2018”***.

1.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi Kecamatan Bangko. Misi adalah sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga akan memberikan arahan jangka panjang, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Adapun Misi Kecamatan bangko adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
2. Meningkatkan usaha mewujudkan situasi wilayah yang kondusif.
3. Meningkatkan peran aktif kelembagaan sosial, ekonomi, dan budaya.

Misi Pertama Meningkatkan sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang profesionalisme didalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Misi Kedua Meningkatkan usaha mewujudkan situasi wilayah yang kondusif dalam mengoptimalkan Sumber daya yang ada.

Misi Ketiga Meningkatkan peran aktif kelembagaan sosial, ekonomi, dan budaya dalam mewujudkan masyarakat yang bersih, rapi, indah dan aman (beriman).

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bangko

A. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi OPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dari 5 misi yang telah dirumuskan diatas, maka dijabarkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi sebagaimana tergambar pada tabel bawah ini:

Tabel 4.1
Tujuan Yang Ditetapkan Untuk Mencapai Visi Dan Misi

NO	MISI	TUJUAN
1	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.	1.Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik 2.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi
2	Meningkatkan usaha mewujudkan situasi wilayah yang kondusif	Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan
3	Meningkatkan peran aktif kelembagaan sosial, ekonomi, dan budaya.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Yang Ditempuh Untuk Mencapai Tujuan

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
MISI KESATU			
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	<p>1. Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah</p> <p>2. Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik</p> <p>3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah</p> <p>4. Peningkatan akuntabilitas</p>	<p>- Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>- Persentase Penyelesaian Penataan Batas Administrasi Kabupaten dan Kecamatan</p> <p>- Rata-rata cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil</p> <p>- Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti</p> <p>- Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah</p> <p>- Persentase tingkat</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
		kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	keselarasan RKPD terhadap RPJMD - Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan - Persentase Pegawai yang mengikuti diklat / Bintek - Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah - Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD - Nilai SAKIP
2	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	- - Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	persentase posyandu dengan strata mandiri
MISI KEDUA			

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	Peningkatankesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan - Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan desa - Persentase aparatur pemerintah desa yang terlatih - Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa
MISI KE TIGA			
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pendidikan - Peningkatan Insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan guru ngaji). 	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio anak yang mengikuti pendidikan Paud - Persentase Pelaksanaan Nilai-nilai Keagamaan

C. Strategi dan Kebijakan

A. Analisis Lingkungan Strategis

Kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi pemerintahan menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Kecamatan Bangko yang berhasil diidentifikasi antara lain :

Tabel 4.3
Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan
Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL			
No	KEKUATAN – S	No	KELEMAHAN – W
S1	Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas	W1	Belum optimalnya alokasi anggaran pelaksanaan tugas.
S2	Sarana/prasarana Kerja yang memadai	W2	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kerja.
S3	Kuantitas SDM yang memadai	W3	Belum terpenuhinya SDM sesuai kebutuhan perencanaan.
FAKTOR EKSTERNAL			
No	PELUANG – O	No	ANCAMAN – T
O1	Perkembangan teknologi	T1	Penggunaan teknologi oleh aparatur yang belum optimal
O2	Dukungan data base dari SKPD lain	T2	Aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya merupakan prioritas.
O3	Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan	T3	Belum terintegrasi perencanaan pembangunan antar wilayah perbatasan

--	--	--	--

a. Faktor Kunci Keberhasilan

1. Penilaian Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan Strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategis. Faktor Kunci Keberhasilan adalah faktor yang memiliki total nilai bobot (TNB) terbesar diantara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang kan dicapai. Faktor Kunci Keberhasilan juga disebut sebagai kekuatan kunci. Untuk menilai tingkat urgensi tiap faktor maka digunakan metode komparasi. Metode Komparasi yaitu metode untuk menentukan urgensi atau tingkat kepentingan suatu faktor dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, guna menentukan faktor mana yang lebih urgen. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Adapun hasil penilaian terhadap tingkat urgensi faktor disajikan dalam matriks berikut.

Tabel 4.4.
Matrik Urgensi Faktor Internal

STRENGTH	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
S1	4	$4/20 \times 100\% = 2\%$
S2	3	$3/20 \times 100\% = 1.5\%$
S3	3	$3/20 \times 100\% = 1.5\%$
WEAKNESS		
W1	3	$3/20 \times 100\% = 1.5\%$
W2	4	$4/20 \times 100\% = 2\%$

W3	4	$4/20 \times 100\% = 1.5\%$
JUMLAH	20	100%

Tabel.4.5
Matrik Urgensi Faktor Eksternal

STRENGTH	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
O1	3	$3/20 \times 100\% = 1.5\%$
O2	4	$4/20 \times 100\% = 2\%$
O3	3	$3/20 \times 100\% = 1.5\%$
WEAKNESS		
T1	3	$3/20 \times 100\% = 1.5\%$
T2	4	$4/20 \times 100\% = 2\%$
T3	3	$3/20 \times 100\% = 1.5\%$
Jumlah	20	100

2. Penetapan Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan besarnya TNB tiap faktor dapat dipilih faktor yang memiliki TNB paling besar sebagai Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) organisasi atau unit kerja dalam mencapai misi. FKK itu merupakan faktor-faktor strategis. Dari tiap kategori strengths, weaknesses, oppurtunities and threats masing-masing dipilih 2 FKK berdasarkan urutan TNB. Cara menentukan FKK dilakukan dengan proses sebagai berikut :

- FKK dipilih dari nilai TNB terbesar.
- Bila nilai TNB sama, pilih nilai NBD terbesar.
- Bila nilai NBD sama, pilih nilai NBK terbesar.
- Bila nilai NBK sama, pilih nilai BF terbesar.
- Bila nilai masih sama, maka pilih berdasarkan pengalaman dan pertimbangan rasional.

Adapun dua kekuatan terpilih dari masing-masing faktor dapat disimak dalam tabel berikut.

Tabel 4.6
Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

FAKTOR INTERNAL			
NO	KEKUATAN – S	NO	KELEMAHAN – W
1	Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1	Belum optimalnya alokasi anggaran pelaksanaan tugas.
2	Sarana/prasarana Kerja yang memadai	2	Belum terpenuhinyasaranadan prasarana kerja.
FAKTOR EKSTERNAL			
NO	PELUANG – O	NO	ANCAMAN – T
1	Perkembangan teknologi	1	Penggunaan teknologi oleh aparatur yang belum optimal
2	Dukungan data base dari SKPD lain	2	Aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya merupakan prioritas.

b. Perumusan dan Penetapan Strategi

1. Perumusan Strategi

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi. Beberapa ahli menganggap, ada 4 (empat) strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni :

a. Strategi ekspansi dirumuskan pada kuadran I.

Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi SO kearah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang yang menjanjikan.

b. Strategi diversifikasi dirumuskan pada kuadran II.

Dalam kuadran II ini dapat diinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi ST untuk melakukan mobilisasi kekuatan kunci, dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci.

c. Strategi stabilitas / rasionalisasi dirumuskan pada kuadran III

Dalam kuadran III ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Strategi defensif / survival dapat dirumuskan pada kuadran IV.

Dalam kuadran IV ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi WT yang dapat menciptakan

suatu keadaan yang defensif atau survival, efisiensi yang menyeluruh atau pengurangan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desakan yang kuat dari ancaman kunci.

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram Formulasi strategi SWOT berikut :

Tabel 4.7
FORMULASI STRATEGI SWOT

<p><u>KAFI :</u> Kesimpulan Analisis Faktor Internal</p> <p><u>KAFE :</u> Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal</p>	<p align="center"><u>STRENGTH</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi yang jelas 2. Motivasi bekerja yang kuat 	<p align="center"><u>WEAKNESS</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinyasasaranadanprasaran a kerja. 2. Belum optimalnya alokasianggaranpelaksanaantugas.
<p align="center"><u>OPPORTUNITIES</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan data base dari SKPD lain 2. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan 	<p align="center"><u>ASUMSI STRATEGI S-O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur dapat melaksanakan tugas dengan Propesionalisme sesuai dengan Tupoksi dalam Struktur organisasi 	<p align="center"><u>ASUMSI STRATEGI W-O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan aggaran kerja yang dicapai

<u>THREAT</u>	<u>ASUMSI STRATEGI S-T</u>	<u>ASUMSI STRATEGI W-T</u>
<p>1. Aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya merupakan prioritas.</p>	<p>1. Meningkatkan Profesionalisme kerja sesuai dengan Tupoksi masing-masing Aparatur dalam melaksanakan tugas terutama yang berhubungan dengan Pelayanan Masyarakat</p>	<p>1. Tidak dapat melaksanakannya Aspirasi yang berkualitas karena tidak didukung oleh anggaran yang memadai sehingga banyak aspirasi yang tidak terealisasi</p>

1.3. Penetapan Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 4.8
STRATEGI YANG DITETAPKAN DALAM RANGKA
PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN MELALUI KEBIJAKAN DAN
PROGRAM

NO	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
		KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4
MISI PERTAMA			
1.	Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelayanan - Program Penataan
2.	Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Administrasi Kependudukan untuk meningkatkan pelayanan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat - Penyusunan dan penetapan regulasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Kependudukan - Proram Visualisa

NO	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
		KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4
3.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> untuk menunjang peyanaan publik - Meningkatkan Keselarasan perencanaan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Optima - Program perencana - Program Peninggi Perencanaan
4.	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.	Menyediakan kesempatan bagi aparatur daerah untuk mengikuti pelatihan dan Bintek	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peninggi Aparatur - Program Peninggi - Program peninggi aparatur - Program Peninggi Intern Pemerinta - Program peninggi pelaporan capaian
5.	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	<p>Pendampingan pelayanan kesehatan ibu dan anak</p> <p>Pemberian perlindungan bagi Perempuan dan Anak dari kekerasan rumah tangga</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program penger BKB-Posyandu-F - Program P kesetaraan gend

NO	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
		KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4
MISI KEDUA			
1.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi khusus pada sentra ekonomi potensial. - Pembangunan khusus daerah tertinggal dan daerah cepat tumbuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pe Masyarakat Perd - Program pening dalam membang - Program Pen Perempuan dalam - Program pening pemerintah desa - Program pening perdesaan
MISI KETIGA			
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pendidikan - Peningkatan Insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan guru ngaji). 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pendidikan untuk tingkat SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMU/ sederajat - Pemberian insentif bagi pegawai SARA di setiap desa/kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendid - Program pening hidup dan Keagamaan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Renstra SKPD Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin sebagai badan perencana mempunyai tugas yang sangat berat terkait dengan makin dinamis dan kompleksnya permasalahan pembangunan. Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin berencana melaksanakan Program dan kegiatan dengan alokasi dana direncanakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin selama kurun waktu lima tahun disajikan dalam matriks tabel 5.1 berikut ini;

Tabel : 5.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan		SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Rp.		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018												
						Target		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
						volu me	satua n	volu me	satua n	volu me	satua n	volu me	satua n	volu me	satua n	volu me	satua n	volu me	satua n	volu me	satua n							
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	XX.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	90	%	Rp.312.240.000,00	91	%	Rp.312.240.000,00	92	%	Rp.323.150.350,00	93	%	Rp.398.304.850,00	94	%	Rp.746.536.200,00	95	%	Rp.737.629.713,00	95	%	Rp.2.554.129.113,00	Kecamatan Bangko	
			XX.XX.01.01	753 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen, surat yang terselesaikan	300	surat	Rp.3.500,000.00	300	surat	Rp.3.500,000.00	350	surat	Rp.3.500,000.00	100	surat	Rp.535.000.00	4300	surat	Rp.5.340,000.00	350	surat	Rp.350,000.00	600	surat	Rp.14.690,000.00	Kecamatan Bangko	Kecamatan Bangko

	XX.XX.01.02	754 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	Rp.15,000,000.00	12	bulan	Rp.15,000,000.00	12	bulan	Rp.15,600,000.00	12	bulan	Rp.11,400,000.00	12	bulan	Rp.65,868,000.00	12	bulan	Rp.60,600,028.00	60	bulan	Rp.222,936,028.00	Kecamatan Bangko	Kecamatan Bangko
	XX.XX.01.03	755 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terlunasi pajaknya	4	unit	Rp.4,000,000.00	6	unit	Rp.4,000,000.00	7	unit	Rp.4,000,000.00	8	unit	Rp.2,600,000.00	9	unit	Rp.5,110,000.00	9	unit	Rp.5,110,000.00	39	unit	Rp.20,820,000.00	Kecamatan Bangko	Kecamatan Bangko
	XX.XX.01.04	756 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	bulan	Rp.54,900,000.00	12	bulan	Rp.54,900,000.00	12	bulan	Rp.54,900,000.00	12	bulan	Rp.54,000,000.00	12	bulan	Rp.115,200,000.00	12	bulan	Rp.115,200,000.00	60	bulan	Rp.394,200,000.00	Kecamatan Bangko	Kecamatan Bangko
	XX.XX.01.05	757 Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	12	bulan	Rp.3,436,500.00	12	bulan	Rp.3,436,500.00	12	bulan	Rp.3,436,500.00	12	bulan	Rp.5,841,100.00	12	bulan	Rp.18,642,600.00	12	bulan	Rp.18,642,600.00	60	bulan	Rp.49,999,300.00	Kecamatan Bangko	Kecamatan Bangko
	XX.XX.01.06	758 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran	16	orang	Rp.124,300,000.00	17	orang	Rp.124,300,000.00	17	orang	Rp.124,300,000.00	20	orang	Rp.149,400,000.00	44	orang	Rp.332,400,000.00	44	orang	Rp.332,400,000.00	44	orang	Rp.1,070,600,000.00	Kecamatan Bangko	Kecamatan Bangko
	XX.XX.01.09	761 Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	Rp.14,500,000.00	12	bulan	Rp.14,500,000.00	12	bulan	Rp.15,550,000.00	12	bulan	Rp.15,206,000.00	12	bulan	Rp.25,550,000.00	12	bulan	Rp.21,229,450.00	60	bulan	Rp.93,785,450.00	Kecamatan Bangko	Kecamatan Bangko
	XX.XX.01.10	762 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	jenis	Rp.9,643,500.00	12	jenis	Rp.9,643,500.00	12	jenis	Rp.10,607,850.00	12	jenis	Rp.10,140,600.00	12	jenis	Rp.9,164,550.00	12	jenis	Rp.14,119,499.00	60	jenis	Rp.53,675,999.00	Kecamatan Bangko	Kecamatan Bangko

	XX.XX.01.11	763 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik yang diadakan	0	jenis	Rp.0.00	3	jenis	Rp.1,110,000.00	3	jenis	Rp.1,110,000.00	6	jenis	Rp.2,220,000.00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko									
	XX.XX.01.12	764 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan peraturan perundangan undangan yang diadakan	3	media massa	Rp.5,780,000.00	3	media massa	Rp.5,780,000.00	3	media massa	Rp.6,358,000.00	3	media massa	Rp.5,780,000.00	3	media massa	Rp.8,600,000.00	3	media massa	Rp.8,462,498.00	15	media massa	Rp.34,980,498.00	Kecamatan Bangko	Kecamatan Bangko
	XX.XX.01.13	765 Penyediaan makanan dan minuman	tersedia makanan dan minuman pegawai/pasien/tamu	12	bulan	Rp.16,480,000.00	12	bulan	Rp.16,480,000.00	12	bulan	Rp.18,128,000.00	12	bulan	Rp.13,673,450.00	12	bulan	Rp.13,673,450.00	12	bulan	Rp.24,128,368.00	60	bulan	Rp.86,083,268.00	Kecamatan Bangko	Kecamatan Bangko
	XX.XX.01.14	766 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	prekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	9	kali	Rp.48,500,000.00	9	kali	Rp.48,500,000.00	10	kali	Rp.53,350,000.00	10	kali	Rp.90,840,000.00	50	kali	Rp.105,630,100.00	50	kali	Rp.105,630,100.00	129	kali	Rp.368,435,200.00	Kecamatan Bangko	Kecamatan Bangko
	XX.XX.01.15	767 Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	prekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	12	kali	Rp.8,500,000.00	12	kali	Rp.8,500,000.00	12	kali	Rp.9,350,000.00	12	kali	Rp.34,188,700.00	50	kali	Rp.25,230,000.00	50	kali	Rp.25,230,000.00	136	kali	Rp.108,798,700.00	Kecamatan Bangko	Kecamatan Bangko

			XX.XX.01.32	1521 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Tersedianya jasa perbaikan Peralatan Kantor	12	Bulan	Rp.3.700,000.00	12	Bulan	Rp.3.700,000.00	12	Bulan	Rp.4,070,000.00	12	Bulan	Rp.4,700,000.00	12	Bulan	Rp.15,017,500.00	12	Bulan	Rp.5,417,170.00	60	Bulan	Rp.32.904,670.00	Kecamatan Bangko	Kecamatan Bangko
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	09.04.01	program penataan pelayanan masyarakat	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	90	%	Rp.0,00	91	%	Rp.0,00	92	%	Rp.0,00	93	%	Rp.49,000,000.00	94	%	Rp.297,916,100,00	95	%	Rp.295,412,100,00	95	%	Rp.590.824.200,00	Kecamatan Bangko	
			09.04.01.01	1520 pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Tersedianya Pelayanan Publik di Kecamatan	0	bulan	Rp.0.00	0	bulan	Rp.0.00	0	bulan	Rp.0.00	12	bulan	Rp.49,000,000.00	12	bulan	Rp.297,916,100,00	12	bulan	Rp.295,412,100,00	12	bulan	Rp.590,824,200.00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko, Lurah Pasar Bangko, Lurah Pasar Atas Bangko, Lurah Dusun Bangko, Lurah Pematang Kandis
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan masyarakat berwawasan kebangsaan	04.06.01	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Peningkatan masyarakat berwawasan kebangsaan	60	%	Rp.0,00	60	%	Rp.39.650.000,00	65	%	Rp.39.650.000,00	70	%	Rp.34.200.000,00	75	%	Rp.42.400.000,00	80	%	Rp.42.400.000,00	80	%	Rp.198.300.000,00	Kecamatan Bangko	

			04.06.01.02	727 Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman akan nilai-nilai agama	frekuensi Pembinaan Nilai-nilai Keagamaan	0 kali	Rp.0.00	1 kali	Rp.39.650.000,00	1 kali	Rp.39.650.000,00	1 kali	Rp.34.200.000,00	1 kali	Rp.42.400.000,00	1 kali	Rp.42.400.000,00	5 kali	Rp.198.300.000,00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	Rata-rata cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	02.06.01	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	70 %	Rp.24.940.000,00	74.45 %	Rp.24.939.500,00	78.6 %	Rp.13.714.000,00	82.35 %	Rp.12.592.000,00	85.75 %	Rp.14.692.000,00	90.01 %	Rp.14.692.000,00	90.01 %	Rp.80.629.500,00	Kecamatan Bangko	
			02.06.01.04	822 Pelayanan dan operasional e-KTP	Jumlah Penduduk yang memperoleh e-KTP	1 Jiwa	Rp.24.940.000,00	1 Jiwa	Rp.24.939.500,00	1 Jiwa	Rp.13.714.000,00	2500 Jiwa	Rp.12.592.000,00	2500 Jiwa	Rp.14.692.000,00	2500 Jiwa	Rp.14.692.000,00	770 Jiwa	Rp.80.629.500,00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	XX.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75 %	Rp.266.958.000,00	80 %	Rp.99.318.000,00	82 %	Rp.101.298.500,00	83 %	Rp.60.200.000,00	84 %	Rp.343.317.000,00	85 %	Rp.121.227.000,00	85 %	Rp.728.635.500,00	Kecamatan Bangko	

	XX.XX. 02.01	1273 Pembangu nan gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	2	Unit	Rp.50,900, 000.00	0	Unit	Rp.0.00	2	Unit	Rp.50,900,0 00.00	Kecam atan Bangko	Kecamat an Bangko
	XX.XX. 02.05	1277 Pengadaa n Kendaraan dinas/oper asional	Jumlah Kendaraa n Dinas/ Operasion al yang diadakan	6	Unit	Rp.210,90 0,000.00	0	Unit	Rp.0.00	1	Unit	Rp.17,500, 000.00	3	Unit	Rp.40,900, 000.00	2	Unit	Rp.40,720, 000.00	0	Unit	Rp.0.00	6	Unit	Rp.102,120, 000.00	Kecam atan Bangko	Kecamat an Bangko
	XX.XX. 02.06	1278 Pengadaa n Perlengkap an Gedung Kantor	Jumlah perlengka pan Gedung Kantor yang diadakan	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	6	Unit	Rp.125,32 0,000.00	0	Unit	Rp.0.00	6	Unit	Rp.125,320, 000.00	Kecam atan Bangko	Kecamat an Bangko
	XX.XX. 02.08	1280 Pengadaa n peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	2	Unit	Rp.5,150,0 00.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.5,150,00 0.00	Kecam atan Bangko	Kecamat an Bangko
	XX.XX. 02.11	1283 Pengadaa n mebeleur	Jumlah Meubeler yang diadakan	5	Unit	Rp.9,425,0 00.00	123	Unit	Rp.9,425,0 00.00	9	Unit	Rp.16,008, 500.00	2	Unit	Rp.6,950,0 00.00	30	Unit	Rp.12,925, 000.00	30	Unit	Rp.12,925, 000.00	194	Unit	Rp.58,233,5 00.00	Kecam atan Bangko	Kantor Lurah Dusun Bangko
	XX.XX. 02.12	1284 Pengadaa n komputer	Jumlah perangkat komputer yang disediaka n	7	Unit	Rp.32,538, 000.00	6	Unit	Rp.21,000, 000.00	6	Unit	Rp.13,450, 000.00	0	Unit	Rp.0.00	10	Unit	Rp.59,550, 000.00	10	Unit	Rp.59,550, 000.00	32	Unit	Rp.153,550, 000.00	Kecam atan Bangko	Kantor Camat Bangko
	XX.XX. 02.13	1285 Pengadaa n alat studio dan komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunika si yang disediaka n	1	Unit	Rp.8,675,0 00.00	3	Unit	Rp.22,718, 000.00	1	Unit	Rp.28,380, 000.00	0	Unit	Rp.0.00	4	Unit	Rp.9,200,0 00.00	4	Unit	Rp.9,200,0 00.00	12	Unit	Rp.69,498,0 00.00	Kecam atan Bangko	Kantor Camat Bangko

			XX.XX.02.15	1287 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	0	Unit	Rp.0.00	5	Unit	Rp.41,275,000.00	5	Unit	Rp.25,960,000.00	8	Unit	Rp.12,350,000.00	24	Unit	Rp.31,552,000.00	24	Unit	Rp.31,552,000.00	24	Unit	Rp.142,964,000.00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko, Lurah Dusun Bangko, Lurah Pasar Atas Bangko, Lurah Pematang Kandis dan Lurah Pasar Bangko
			XX.XX.02.23	1378 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	Rp.5.420,000.00	1	Unit	Rp.4,900,000.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	2	Unit	Rp.8,000,000.00	2	Unit	Rp.8,000,000.00	4	Unit	Rp.20,900,000.00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	XX.XX.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75	%	Rp.14.125.000,00	80	%	Rp.13.300.000,00	82	%	Rp.22.750.000,00	83	%	Rp.29.990.000,00	84	%	Rp.74.870.000,00	85	%	Rp.74.780.000,00	85	%	Rp.215.600.000,00	Kecamatan Bangko	

			XX.XX.05.01	1304 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	38	Stel	Rp.14,125,000.00	38	Stel	Rp.13,300,000.00	70	Stel	Rp.22,750,000.00	38	Stel	Rp.29,990,000.00	172	Stel	Rp.74,870,000.00	172	Stel	Rp.74,780,000.00	490	Stel	Rp.215,600,000.00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko, Lurah Dusun Bangko, Lurah Pasar Atas Bangko, Lurah Pematang Kandis dan Lurah Pasar Bangko
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase peningkatan jabatan fungsional tertentu	XX.XX.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan jabatan fungsional tertentu	20	%	Rp.41.300.000,00	25	%	Rp.53.100.000,00	28	%	Rp.50.650.000,00	31	%	Rp.22.500.000,00	36	%	Rp.45.000.000,00	40	%	Rp.45.000.000,00	40	%	Rp.216.250.000,00	Kecamatan Bangko	
			XX.XX.04.03	1302 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti BinteK Tekhnis Fungsional	4	Orang	Rp.41,300,000.00	4	Orang	Rp.53,100,000.00	4	Orang	Rp.50,650,000.00	5	Orang	Rp.22,500,000.00	0	Orang	Rp.45,000,000.00	0	Orang	Rp.45,000,000.00	19	Orang	Rp.216,250,000.00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah	04.02.05	Program Optimalisasi Penerimaan Daerah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah	85	%	Rp.0,00	87	%	Rp.0,00	89	%	Rp.5.700.000,00	90	%	Rp.5.070.000,00	91	%	Rp.108.784.000,00	92	%	Rp.108.784.000,00	92	%	Rp.228.338.000,00	Kecamatan Bangko	
			04.02.05.02	1519 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB	terlaksananya program monitoring dan Evaluasi PBB dan BPHTB	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	12	Kali	Rp.5.700,000.00	3	Kali	Rp.5.070,000.00	12	Kali	Rp.21.150,000.00	12	Kali	Rp.21.150,000.00	39	Kali	Rp.53.070,000.00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko, Lurah Pasar Atas Bangko
			04.02.05.04	1629 Penyampaian DHKP dan SPPT PBB	Jumlah DHKP dan SPT PBB yang Didistribusikan	0	Wajib Pajak	Rp.0.00	0	Wajib Pajak	Rp.0.00	0	Wajib Pajak	Rp.0.00	0	Wajib Pajak	Rp.0.00	12	Wajib Pajak	Rp.87.634,000.00	12	Wajib Pajak	Rp.87.634,000.00	24	Wajib Pajak	Rp.175.268,000.00	Kecamatan Bangko	Kantor Lurah Dusun Bangko, Lurah Pasar Bangko, Lurah Pematang Kandis
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	04.06.09	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WD P		Rp.0,00	WD P		Rp.0,00	WD P		Rp.7.099.650,00	WD P		Rp.5.600.000,00	WD P		Rp.8.018.000,00	WTP		Rp.8.018.000,00	WTP		Rp.28.735.650,00	Kecamatan Bangko	

			04.06.09.01	860 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Laporan Pelaksanaan SPIP Yang disusun	0	dokumen	Rp.0.00	0	dokumen	Rp.0.00	1	dokumen	Rp.7,099,650.00	1	dokumen	Rp.5,600,000.00	1	dokumen	Rp.8,018,000.00	1	dokumen	Rp.8,018,000.00	4	dokumen	Rp.28,735,650.00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko, Lurah Pasar Atas Bangko
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	04.01.02	Program Perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	60	%	Rp.0.00	65	%	Rp.0.00	70	%	Rp.0.00	75	%	Rp.4,596,500.00	80	%	Rp.12,910,700.00	95	%	Rp.8,314,200.00	95	%	Rp.16,628,400.00	Kecamatan Bangko	
			04.01.02.03	295 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya musrenbang RKPD tepat waktu	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.4,596,500.00	1	Kali	Rp.12,910,700.00	1	Kali	Rp.8,314,200.00	1	Kali	Rp.16,628,400.00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko, Kantor Lurah Pasar Atas Bangko
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	XX.XX.06	Program peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	60	%	Rp.4.597.500,00	65	%	Rp.5.774.000,00	70	%	Rp.5.500.000,00	75	%	Rp.5.587.500,00	80	%	Rp.5.065.000,00	95	%	Rp.5.065.000,00	95	%	Rp.26.991.500,00	Kecamatan Bangko	
			XX.XX.06.03	1308 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	1	Dokumen	Rp.4.597.500,00	1	Dokumen	Rp.5.774.000,00	1	Dokumen	Rp.5.500.000,00	5	Dokumen	Rp.5.587.500,00	5	Dokumen	Rp.5.065.000,00	5	Dokumen	Rp.5.065.000,00	17	Dokumen	Rp.26.991.500,00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	XX.XX.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75	%	Rp.0,00	80	%	Rp.0,00	82	%	Rp.0,00	83	%	Rp.0,00	84	%	Rp.0,00	85	%	Rp.0,00	85	%	Rp.0,00	Kecamatan Bangko	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP	XX.XX.03	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	C		Rp.6.749.000,00	C		Rp.4.200.000,00	C		Rp.5.160.000,00	C		Rp.5.697.000,00	C		Rp.6.147.000,00	B		Rp.6.147.000,00	B		Rp.27.351.000,00	Kecamatan Bangko	
			XX.XX.03.01	1293 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	8	Dokumen	Rp.2.980,000,00	8	Dokumen	Rp.2.890,000,00	15	Dokumen	Rp.3.881,000,00	15	Dokumen	Rp.4.260,000,00	15	Dokumen	Rp.4.260,000,00	15	Dokumen	Rp.4.260,000,00	68	Dokumen	Rp.19.551,000,00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko
			XX.XX.03.02	1294 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan yang disusun	9	Dokumen	Rp.3.769,000,00	9	Dokumen	Rp.1.310,000,00	9	Dokumen	Rp.1.279,000,00	9	Dokumen	Rp.1.437,000,00	9	Dokumen	Rp.1.887,000,00	9	Dokumen	Rp.1.887,000,00	45	Dokumen	Rp.7.800,000,00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	XX.XX.07	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	1	Kali	Rp.0,00	1	Kali	Rp.15.915.000,00	1	Kali	Rp.15.264.000,00	1	Kali	Rp.15.159.100,00	1	Kali	Rp.15.184.100,00	1	Kali	Rp.15.184.100,00	5	Kali	Rp.76.704.300,00	Kecamatan Bangko	

			02.02.05.05	2040 Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan	Terlaksananya pembinaan program PKK	0	Orang	Rp.0.00	0	Orang	Rp.0.00	0	Orang	Rp.0.00	0	Orang	Rp.0.00	40	Orang	Rp.6.784,000.00	40	Orang	Rp.6.784,000.00	40	Orang	Rp.13.568,000.00	Kecamatan Bangko	Kantor Lurah Pasar Bangko, Kantor Lurah Pematang Kandis
Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah	Persentase aparat pemerintah desa yang terlatih	02.07.04	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat pemerintah desa yang terlatih	54	%	Rp.0.00	60	%	Rp.5.685.000,00	68	%	Rp.5.250.000,00	76	%	Rp.5.168.500,00	80	%	Rp.10.164.600,00	85	%	Rp.10.164.600,00	85	%	Rp.37.032.700,00	Kecamatan Bangko	
			02.07.04.09	1539 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa/kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan Administrasi desa	0	kali	Rp.0.00	3	kali	Rp.5,685,000.00	3	kali	Rp.5,250,000.00	3	kali	Rp.5,168,500.00	4	kali	Rp.10,164,600.00	4	kali	Rp.10,164,600.00	17	kali	Rp.37,032,700.00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko, Lurah Dusun Bangko
Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah	Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa	03.06.03	Program Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa	41	%	Rp.0.00	0	%	Rp.0.00	0	%	Rp.0.00	0	%	Rp.0.00	0	%	Rp.21,007,700.00	0	%	Rp.13.952.000,00	79	%	Rp.27.904.000,00	Kecamatan Bangko	

			02.07.02.01	1550 Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan	jumlah dokumen Profil Desa/kelurahan yang tersusun	0	dokumen	Rp.0.00	0	dokumen	Rp.0.00	0	dokumen	Rp.0.00	4	dokumen	Rp.23,378,500.00	4	dokumen	Rp.28,378,500.00	8	dokumen	Rp.56,757,000.00	Kecamatan Bangko	Kantor Lurah Dusun Bangko, Lurah Pasar Atas Bangko, Lurah Pematang Kandis, Lurah Pasar Bangko			
			02.07.02.03	1554 Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Unggulan	jumlah peserta lomba desa dan kelurahan unggulan	0	Desa	Rp.0.00	1	Desa	Rp.5,425,000.00	1	Desa	Rp.5,125,000.00	1	Desa	Rp.2,825,000.00	5	Desa	Rp.22,506,000.00	5	Desa	Rp.22,506,000.00	13	Desa	Rp.58,387,000.00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko, Lurah Dusun Bangko, Lurah Pasar Bangko, Lurah Pasar Atas Bangko, Lurah Pematang Kandis
			02.07.02.10	1562 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	0	Bulan	Rp.0.00	0	Bulan	Rp.0.00	0	Bulan	Rp.0.00	12	Bulan	Rp.6,209,650.00	12	Bulan	Rp.6,500,000.00	12	Bulan	Rp.6,125,000.00	12	Bulan	Rp.18,459,650.00	Kecamatan Bangko	Kantor Camat Bangko
Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang Formal	02.02.01	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang Formal	1	%	Rp.0.00	1	%	Rp.20.629.000,00	4	%	Rp.20.670.600,00	8	%	Rp.17.485.800,00	10	%	Rp.16,170,600,00	15	%	Rp.17.985.800,00	15	%	Rp.92.191.800,00	Kecamatan Bangko	

Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	01.02.31	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	85	%	Rp.0,00	90	%	Rp.0,00	92	%	Rp.0,00	94	%	Rp.0,00	96	%	Rp.4.500.000,00	100	%	Rp.4.500.000,00	100	%	Rp.9.000.000,00	Kecamatan Bangko	
			01.02.31.01	2041 Pengkajian pengembangan model operasional BKB Posyandu PADU	Tersedianya pelayanan posyandu yang lebih baik	0	Unit	Rp.0,00	0	Unit	Rp.0,00	0	Unit	Rp.0,00	0	Unit	Rp.0,00	5	Unit	Rp.4.500.000,00	5	Unit	Rp.4.500.000,00	10	Unit	Rp.9.000.000,00	Kecamatan Bangko	Kantor Lurah Dusun Bangko
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan mempermudah akses dan sentra perekonomian masyarakat dan daerah	Peningkatan kualitas jalan, jembatan dan prasarana transportasi	Persentase pertumbuhan panjang jalan koneksi antar desa dan jalan non stastus dalam kondisi baik	01.01.14	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase pertumbuhan panjang jalan koneksi antar desa dan jalan non stastus dalam kondisi baik	50	%	Rp.0,00	28.24	%	Rp.0,00	23.03	%	Rp.0,00	27.45	%	Rp.0,00	10.93	%	Rp.14.755.700,00	10.34	%	Rp.14.755.700,00	100	%	Rp.29.511.400,00	Kecamatan Bangko	

			01.01.14.10	1881 pembinaan program PKK	Jumlah kelompok PKK yang dibina	0	Kelurahan	Rp.0.00	0	Kelurahan	Rp.0.00	0	Kelurahan	Rp.0.00	0	Kelurahan	Rp.0.00	2	Kelurahan	Rp.14,755,700.00	2	Kelurahan	Rp.14,755,700.00	4	Kelurahan	Rp.29.511,400.00	Kecamatan Bangko	Kantor Lurah Pasar Atas Bangko, Kantor Lurah Pasar Bangko
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi	Peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan gratis berkualitas, fasilitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik	Rasio anak yang mengikuti pendidikan Paud	01.01.01	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio anak yang mengikuti pendidikan Paud	10.1	%	Rp.0.00	13.2	%	Rp.0.00	15.3	%	Rp.0.00	17.5	%	Rp.0.00	19.3	%	Rp.3.000,000.00	22.6	%	Rp.20.00	22.6	%	Rp.40.00	Kecamatan Bangko	
			01.01.01.33	1503 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah guru PAUD yg mendapat bantuan	0	Orang	Rp.0.00	0	Orang	Rp.0.00	0	Orang	Rp.0.00	0	Orang	Rp.0.00	3000000	Orang	Rp.3.000,000.00	3000000	Orang	Rp.20.00	40	Orang	Rp.40.00	Kecamatan Bangko	Bangko
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing dan investasi, ketenagakerjaan dan kinerja	Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyedia infrastruktur berdaya	Jumlah nilai investasi	02.13.08	Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi	Rp.533,999	JUTA	Rp.0.00	Rp.6.380.000.00	Rp.650,000	JUTA	Rp.6.904.100.00	Rp.710,000	JUTA	Rp.6.904.100.00	Rp.770,000	JUTA	Rp.3.820.000.00	Rp.800,998	JUTA	Rp.6.904.100.00	Rp.800,998	JUTA	Rp.30.912.300.00	Kecamatan Bangko			

BAB VI
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANGKO MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2014-2018

Indikator kinerja Kecamatan Bangko yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bangko dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Indikator kinerja Kecamatan Bangko yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 ;

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Kecamatan Bangko yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014-2018 Kabupaten Merangin

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %	95 %
2	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %	95 %
3	Persentase Peningkatan masyarakat berwawasan kebangsaan	60 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	80 %
4	Rata-rata cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	70,00 %	74,45 %	78,60 %	82,35 %	85,75%	90,01 %	90,01 %
5	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75 %	80 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %
6	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75 %	80 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEC. BANGKO KAB. MERANGIN

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Persentase peningkatan jabatan fungsional tertentu	20 %	25 %	28 %	31 %	36 %	40 %	40 %
8	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah	85 %	87 %	89 %	90 %	91 %	92 %	92 %
9	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
10	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	95 %	95 %
11	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	95 %	95 %
12	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75 %	80 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %
13	Nilai SAKIP	C	C	C	C	C	B	B
14	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
15	Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan desa	54 %	60%	68 %	76 %	80 %	85 %	85 %
16	Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan desa	54 %	60 %	68 %	76 %	80 %	85 %	85 %
17	Persentase aparatur pemerintah desa yang terlatih	54 %	60 %	68 %	76 %	80 %	85 %	85 %
18	Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa	41 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	79 %
19	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan	10 Kelompok	12 Kelompok	13 Kelompok	14 Kelompok	15 Kelompok	16 Kelompok	16 Kelompok
20	Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang Formal	1 %	1 %	4 %	8 %	10 %	15 %	15 %
21	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	7.20 %	7.20 %	6.8 %	6.4 %	6 %	5.6 %	5.60 %
22	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	85 %	90 %	92 %	94 %	96 %	100 %	100 %
23	Persentase pertumbuhan panjang jalan koneksi antar desa dan jalan non status dalam kondisi baik	50 %	28.24 %	23.030 %	27.45 %	10.93 %	10.34 %	100 %
24	Rasio anak yang mengikuti pendidikan Paud	10.10 %	13.20 %	15.30 %	17.50 %	19.30 %	22.60 %	22.60 %
25	Jumlah nilai investasi	Rp. 533,999 JUTA	Rp. 599,000 JUTA	Rp. 650,000 JUTA	Rp. 710,000 JUTA	Rp. 770,000 JUTA	Rp. 800,998 JUTA	Rp. 800,998 JUTA

6.2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Dari beberapa Indikator kinerja Kecamatan Bangko tersebut, yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangko dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangko
Periode 2014-2018 Kabupaten Merangin

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Penataan Batas Administrasi Kabupaten dan Kecamatan	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin periode 2014-2018, maka terdapat beberapa program yang menjadi prioritas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;

1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Penataan Pelayanan Masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

KECAMATAN BANGKO

Jalan Bangko – Kerinci Km. 4, Waskita Karya, Bangko, Kode Pos 37312
Telpon : 0746 – Fax : Email : kecamatanbangko@gmail.com

BAB VII

PENUTUP

Dengan tersusunnya RENSTRA Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, maka dengan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menjadi pelaksana pencapaian target-target visi misi RPJMD 2014-2018.

Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bangko serta dapat juga memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).